

## **Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Tiga SD Negeri di Kabupaten Gresik**

**Shofiyatul Jannah**

Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

e-mail: shofiyatul047@yahoo.co.id

**Dr. Sri Setyowati, M.Pd.**

Jurusan PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

e-mail: trinilbrow@hotmail.com

### **Abstrak**

Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan adanya keterampilan manajerial kepala sekolah. Keterampilan manajerial dibutuhkan dalam mengelola komponen-komponen keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terdiri dari tenaga pendidik, sarana dan prasarana, peserta didik, dan adanya dukungan orang tua. Keterampilan manajerial meliputi tiga macam bidang keterampilan yaitu, keterampilan konseptual, teknik, dan hubungan manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian fenomenologi. Peneliti ingin mendeskripsikan pengalaman kepala sekolah selama menjalankan sekolah inklusif ditinjau dari segi keterampilan manajerialnya. Subjek dari penelitian ini adalah tiga kepala sekolah yaitu di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyunan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dua dari tiga keterampilan manajerial telah dikuasai oleh setiap kepala sekolah meliputi keterampilan konseptual dan hubungan manusia. Sedangkan untuk keterampilan teknis, setiap kepala sekolah memiliki tingkat pemahaman yang berbeda.

Keterampilan konseptual berhubungan dengan tingkat pemahaman kepala sekolah akan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Setiap kepala sekolah telah memahami konsep penyelenggaraan inklusif dibuktikan dengan pemahaman kepala sekolah akan pentingnya ketersediaan GPK, ABK, sarana prasarana aksesibilitas dan dukungan orang tua. Keterampilan teknik berperan dalam menyediakan berbagai sarana prasarana khusus terutama media pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan ABK. Setiap kepala sekolah telah berusaha menyediakan sarana prasarana aksesibilitas di sekolahnya meskipun dengan tingkat pemahaman yang berbeda dalam berbagai metode, prosedur maupun media untuk membimbing ABK. Keterampilan hubungan manusia berperan dalam mengelola tenaga pendidik, peserta didik, maupun menjalin dukungan orang tua telah dipahami dan dilaksanakan dengan adanya komunikasi, kerjasama dan pemberian motivasi.

**Kata Kunci:** *keterampilan konseptual, keterampilan teknik, keterampilan hubungan manusia, pendidikan inklusif*

### **Abstract**

Inclusive education program needs the principal's managerial skill. The managerial skill is needed to manage some supporting factors for inclusive education such as educators, facilities, learners, and parents' supports. The managerial skill covers three skills; they are conceptual skill, technique, and human relationship.

This study uses qualitative approach with phenomenology research design. The researcher wants to describe the principal's experiences in implementing inclusive education program from their managerial skill. Subjects of the study are three principals from Elementary School 1 Tlogopatut, Elementary School 7 Sidokumpul, and Elementary School Mriyunan.

The result of the study shows two of three managerial skills have been mastered by the principals include conceptual skill and human relationship. However, the principals have different understanding for technical skill.

Conceptual skill is associated with the principal's understanding for the implementation of inclusive education program. Each principle has understood the concept, rule and policy of the implementation of inclusive education which is proven by the availabilities of teacher special need, facilities, and parents' supports. Technical skill has a role in managing the facilities for special need especially in giving the specific learning media that matched with them. Each principle has been trying to provide proper facilities at school although in different understanding of methods, procedures, or media for special need. Meanwhile, human relationship skill has a role in managing educators, learners, or establishing parents' supports that already understood and implemented though communication, cooperation, and motivation.

**Key words:** *conceptual skill, technical skill, human relationship skill, inclusive education.*

## PENDAHULUAN

“Hakekat pendidikan adalah memanusiakan manusia, mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berani dan mampu menghadapi problema yang dihadapi tanpa rasa tertekan, mampu, dan senang meningkatkan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi (Mudjito dkk, 2012:11)”. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan untuk semua (education for all) yang menegaskan bahwa semua anak, remaja dan orang dewasa tak terkecuali anak berkebutuhan khusus mempunyai hak (human right) yang sama untuk memperoleh manfaat dari proses pendidikan.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan baik itu kelainan fisik, mental maupun perilaku sosial (Efendi, 2009:2). Hambatan yang dialami ABK dalam mengakses pendidikan setinggi mungkin bukan karena kecacatannya melainkan pada penerimaan sosial masyarakat, karena masyarakat awam memandang negatif hambatan yang ada dalam diri anak berkebutuhan khusus (Permendiknas, 2009:9).

Keberadaan anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan, oleh sebab itu sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dijabarkan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 telah mengatur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Implementasinya dijabarkan melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yaitu dengan memberikan kesempatan atau peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Inilah apa yang disebut dengan istilah pendidikan inklusif (Mudjito dkk, 2012:11).

Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas, 2009:10).

Adapun peraturan perundang-undangan secara nasional yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di antaranya adalah, Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 5 yang berbunyi “setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam hal segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Lebih lanjut Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.6/MN/2003 pada tanggal 20 januari 2003 yang menyatakan setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan

mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 sekolah. Selain landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia juga memiliki landasan filosofis, pedagogis dan landasan empiris yang kuat (Permendiknas, 2009:12).

Dalam setting penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler, terdapat sejumlah anak berkebutuhan khusus yang merupakan sebagian kecil dari jumlah peserta didik yang bersekolah. ABK ini memerlukan penanganan yang sedikit berbeda dengan anak reguler pada umumnya baik dari segi tenaga pendidik, sarana prasarana, sistem penerimaan, penempatan, maupun pembinaannya. Oleh sebab itu diperlukan keterampilan manajerial untuk mengelola semua aspek tersebut.

Kepala sekolah merupakan manajer di sekolah, untuk itu kepala sekolah diharapkan memiliki keterampilan manajerial dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Keterampilan manajerial meliputi tiga macam bidang keterampilan, yaitu keterampilan konseptual, teknik, dan hubungan manusia (Hersey dkk dalam Wahjosumidjo, 2010:99). Ketiga keterampilan manajerial tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat kedudukan manajer, kecuali keterampilan hubungan manusia. Keterampilan hubungan manusia dibutuhkan dalam jumlah proporsi yang sama untuk semua tingkatan manajer, baik manajer tingkat bawah, tingkat atas, maupun tingkat menengah. Hal ini tidak lain karena sebagian besar aktivitas adalah berhubungan dengan manusia.

Keterampilan konseptual merupakan kemampuan untuk memformulasikan pikiran, memahami teori-teori, melakukan aplikasi, melihat kecenderungan berdasarkan kemampuan teoritis (Kartz dalam Danim, 2008:215). Keterampilan ini merupakan keterampilan yang sifatnya mendukung, namun keterampilan ini tidak kalah pentingnya mengingat pemahaman akan konsep penyelenggaraan pendidikan inklusif mutlak diperlukan. Tanpa adanya pemahaman maka kepala sekolah tidak akan memiliki pegangan dalam mengelola sekolahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Danim dan Suparno yang menjelaskan bahwa, penguasaan pengetahuan oleh kepala sekolah sangat esensial dalam implementasi manajemen di sekolahnya. Penelitian Hunter menyimpulkan bahwa pengetahuan akan pekerjaan mempunyai korelasi yang tinggi dengan prestasi kerja (Danim dan Suparno, 2009:25).

Keterampilan teknik adalah kemampuan yang berhubungan erat dengan penggunaan alat-alat, prosedur, metode dan teknik dalam suatu aktivitas manajemen secara benar (Yuki dalam Winardi, 2010:84). Implementasi keterampilan teknik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ditunjukkan kepala sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang proses pembelajaran ABK. Sarana dan

prasarana yang dimaksud berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana aksesibilitas bagi ABK.

Sedangkan keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain, baik perorangan maupun dalam kelompok (Kartz dalam Danim, 2008:215). Implementasi keterampilan hubungan manusia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ditunjukkan melalui tindakan dan sikap kepala sekolah dalam mengelola GPK, ABK, dan dalam menjalin dukungan orang tua peserta didik. Tindakan dan sikap tersebut berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah menjalin komunikasi, kerjasama dan memotivasi. Karena pendidikan inklusif merupakan hal yang relatif baru maka diperlukan sosialisasi kepada semua pihak sekolah. Agar semua pihak dapat saling bekerjasama untuk mensukseskan program tersebut.

Tercatat ada 1.185 anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Gresik. Sedangkan hanya sekitar 600 anak yang bersekolah. Sisanya tidak menempuh pendidikan sama sekali (Jawa Pos *Online*, 2014).

Kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan tujuan pendidikan. Sedangkan dalam rangka mendukung program pendidikan inklusif Bupati Gresik telah mengeluarkan Peraturan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Gresik pasal 4 yang berbunyi “Pendidikan inklusif diselenggarakan pada semua satuan pendidikan di wilayah daerah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik”. Kabupaten Gresik juga telah ditunjuk sebagai Kabupaten penyelenggara pendidikan inklusif oleh Direktorat Pendidikan Dasar Khusus Layanan Khusus (PKLK) tahun 2013 (Antar Jatim *Online*, 2013).

Realisasi dari peraturan tersebut sudah ada beberapa sekolah tingkat sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Gresik. Salah satunya adalah SD Negeri Mriyunan Sidayu Gresik.

SD Negeri Mriyunan merupakan sekolah dasar yang berada di wilayah utara Kabupaten Gresik. SD ini merupakan sekolah inklusif satu satunya yang ada di Kecamatan Sidayu. SD ini berdiri sejak tahun 1979 dan mulai menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada tahun 2003, sejak datangnya kepala sekolah baru menjabat di SD tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan kepala sekolah saat wawancara studi pendahuluan yang peneliti lakukan, kepala sekolah bercerita bagaimana kepala sekolah yang dulu memiliki keterampilan konseptual dan keterampilan hubungan manusia yang memadai. Keterampilan konseptual ditunjukkan dari penguasaan materi dan kosep seputar penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini sejalan dengan latar belakang pendidikan

kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan luar biasa.

Sedangkan keterampilan hubungan manusia ditunjukkan dari bagaimana kepala sekolah mampu berkomunikasi dengan baik dengan tenaga pendidik di sana berkaitan dengan keinginan beliau untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan juga ditunjukkan dengan melakukan pelatihan sendiri seputar penanganan ABK. Tanpa adanya komunikasi dan kerjasama dengan seluruh komponen sekolah maka penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Mriyunan tidak mungkin dapat direalisasikan.

Keterampilan teknik ditunjukkan kepala sekolah dengan menyediakan sarana aksesibilitas berupa Pusat Pelayanan ABK yang diberi nama PUSPA. Selain itu kepala sekolah juga menyediakan berbagai alat aksesibilitas lainnya bagi ABK untuk menunjang proses pembelajaran.

Pada tahun 2015 SDN Mriyunan mengalami pergantian kepala sekolah. Meskipun kepala sekolah yang sekarang tidak memiliki latar belakang pendidikan inklusif namun hal ini tidak menjadi kendala dalam menangani manajemen sekolah inklusif. Apalagi kepala sekolah yang sekarang merupakan guru senior di SDN Mriyunan jadi sudah tau banyak tentang pendidikan inklusif. Pendapat tersebut dikemukakan oleh koordinator inklusif di SDN Mriyunan.

Berdasarkan keterampilan manajerial kepala sekolah yang sekarang SDN Mriyunan tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan menambah GPK yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi dimana sebelumnya tenaga pendidik yang menjadi GPK di SDN Mriyunan belum ada yang memiliki spesialisasi khusus dalam menangani ABK. Penambahan tenaga pendidik tersebut merupakan salah satu penerapan dari keterampilan konseptual kepala sekolah. Kepala sekolah menyadari pentingnya GPK yang berspesialisasi dalam lingkungan sekolah inklusif.

Prestasi-prestasi yang ditorehkan peserta didik selama tahun 2015 juga sangat memuaskan diantaranya yaitu juara 1 Lomba Pildacil HUT Resources Center Ke-2 Kabupaten Gresik Tahun 2015, juara 1 Lomba Kerajinan Tangan dan nominasi lomba TEKPRAM jambore pendidikan inklusif tahun 2015. Berbagai prestasi yang telah dipaparkan merupakan prestasi yang diraih oleh peserta didik ABK. Data tersebut berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis pada saat studi pendahuluan.

Prestasi yang ditorehkan tentu membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak. Pada kenyataannya prestasi-prestasi yang telah didapatkan tersebut berkat kerjasama antara kepala sekolah dengan koordinator inklusif dan guru yang ada di sekolah tersebut. Kepala

sekolah selalu berdiskusi dan berkoordinasi dengan koordinator inklusif dalam menentukan program pengembangan bagi ABK, senantiasa menayakan bagaimana perkembangan peserta didik pada guru, tak lupa menanyakan kesulitan, dan mencoba memberikan motivasi kepada guru yang mengalami kesulitan saat membimbing ABK. Berdasarkan sikap dan perilaku yang ditunjukkan kepala sekolah membuktikan bahwa kepala sekolah mampu menerapkan keterampilan hubungan manusia dengan baik.

Apabila mengacu pada sepak terjang manajerial kedua kepala sekolah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan manajerial sangat diperlukan dalam mengelola sekolah inklusif. Keterampilan-keterampilan tersebut saling berkaitan, dan saling mendukung satu sama lain.

Penelitian yang mengangkat tentang manajerial kepala sekolah telah banyak dilakukan tapi sepengetahuan peneliti belum ada yang menyangkut tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan kenyataan tersebut dan dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Tiga SD Negeri di Kabupaten Gresik".

Secara umum pokok dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana keterampilan manajerial kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di 3 (tiga) SD Negeri di Kabupaten Gresik. Adapun sub fokus penelitian dirinci sebagai berikut:

1. Keterampilan konseptual kepala sekolah dalam memahami konsep pendidikan inklusif.
2. Keterampilan teknik kepala sekolah dalam menyediakan sarana prasarana aksesibilitas bagi ABK.
3. Keterampilan hubungan manusia kepala sekolah dalam mengelola GPK.
4. Keterampilan hubungan manusia kepala sekolah dalam mengelola ABK.
5. Keterampilan hubungan manusia kepala sekolah dalam menjalin dukungan orang tua peserta didik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian fenomenologi. Fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini dalam perspektif Alfred Schutz. Inti dari fenomenologi Schutz adalah memandang bahwa pemahaman atas tindakan, ucapan, dan interaksi merupakan prasyarat bagi eksistensi sosial apapun (Mulyana, 2010:62). Schutz menjelaskan bahwa, "Fenomenologi mengkaji bagaimana anggota masyarakat menggambarkan dunia sehari-harinya, terutama bagaimana individu dengan kesadarannya membangun makna dari

hasil interaksi dengan individu lainnya (Cresswell, 2010:62)".

Subjek dari penelitian ini adalah kepala sekolah di 3 (tiga) SD Negeri di Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyunan. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1) wawancara tidak terstruktur, 2) observasi non partisipatif, dan 3) studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara berulang dengan melakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk meningkatkan kepercayaan hasil penelitian maka dilakukan pengecekan keabsahan data melalui 1) kredibilitas dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keterampilan Konseptual Kepala Sekolah dalam Memahami Konsep Pendidikan Inklusif**

Berdasarkan temuan peneliti, semua kepala sekolah baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan di SDN Mriyunan tidak berlatar belakang pendidikan luar biasa, namun semua kepala sekolah telah mengikuti berbagai pelatihan seputar pendidikan inklusif. Ilmu tentang pendidikan inklusif diperoleh dari beberapa pelatihan, seminar dan workshop. Dari pelatihan inilah kepala sekolah memperoleh pengetahuan tentang apa itu pendidikan inklusif dan mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hasil temuan dalam penelitian ini tentang tingkat pengetahuan kepala sekolah yang diperoleh dari hasil pelatihan membenarkan teori Danim dan Suparno (2009:25) yang menyebutkan, banyak faktor yang mempengaruhi bobot pengetahuan yang dimiliki seorang kepala sekolah, di antaranya adalah tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), lingkungan kerja, serta sarana prasarana yang mendukung.

Berdasarkan temuan peneliti masing-masing kepala sekolah baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan di SDN Mriyunan telah memahami konsep, prinsip dan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dibuktikan dengan rata-rata pendapat yang sama telah diberikan oleh setiap kepala sekolah. Pendapat yang sama tersebut kemudian dapat ditarik suatu makna akan konsep pendidikan inklusif menurut kepala sekolah yaitu, pendidikan inklusif adalah sekolah dengan prinsip kebersamaan, yaitu menampung peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya dalam satu lingkungan yang sama, untuk

menyelenggarakannya membutuhkan penanganan khusus yang sedikit berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Karena sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terdapat sejumlah anak berkebutuhan khusus yang memerlukan penanganan yang sedikit berbeda dengan anak reguler pada umumnya baik dari segi tenaga pendidik, sarana prasarana, sistem penerimaan, penempatan, maupun pembinaannya.

Konsep pendidikan inklusif menurut kepala sekolah tidak jauh berbeda dengan konsep pendidikan inklusif yang tertuang dalam Permendiknas No.70 tahun 2009 (2009:10), yang menjelaskan pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Berdasarkan pemahaman kepala sekolah akan konsep, prinsip, dan kebijakan kepala sekolah, kepala sekolah memahami akan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, hal ini berarti sesuai dengan pendapat Rossow (dalam Astuti, 2011:49) yang menjelaskan bahwa, kepala sekolah di sekolah inklusif sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif dan disiplin ilmu pendidikan berkebutuhan khusus, sehingga aktivitas yang dijalankan sebagai kepala sekolah benar-benar berakar dari filosofi pendidikan inklusif.

Penguasaan konsep pendidikan inklusif juga ditunjukkan kepala sekolah melalui kegiatan analisis dimana kepala sekolah mampu menganalisis kondisi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya terkait komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan inklusif yang terdiri dari ketersediaan GPK, ABK, sarana prasarana aksesibilitas dan adanya dukungan orang tua. Kepala sekolah juga mampu berfikir rasional dalam menyikapi kebutuhan akan penyediaan komponen-komponen tersebut.

Kecakapan dalam menganalisis dan berfikir rasional merupakan bentuk dari keterampilan konseptual kepala sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuki (dalam Winardi 2010:84) yang menjelaskan bahwa, keterampilan konseptual merupakan kemampuan analisis general,

melogikakan pemikiran, kecakapan dalam memformulasi konsep dan konseptualisasi yang kompleks serta menghubungkan keduanya: kreatif dalam membangkitkan ide dan pemecahan masalah serta kemampuan untuk menganalisa kejadian, perubahan-perubahan, antisipatif, dan menghargai kesempatan, dan kemampuan menangani masalah potensial (instruktif dan pemikiran deduktif).

## 2. Keterampilan Teknik Kepala Sekolah dalam Menyediakan Sarana Prasarana Aksesibilitas Bagi ABK

Berdasarkan hasil temuan masing-masing kepala sekolah baik Kepala SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyunan menyadari pentingnya menyediakan sarana prasarana aksesibilitas bagi ABK di sekolah inklusif. Menurut kepala sekolah ABK membutuhkan berbagai sarana prasarana khusus terutama media pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan mereka. Untuk itu setiap kepala sekolah telah berusaha menyediakan sarana prasarana aksesibilitas di sekolahnya.

Hasil temuan dalam penelitian ini yakni tentang kepala sekolah menyadari pentingnya menyediakan sarana prasarana khusus bagi ABK dan tentang upaya kepala sekolah dalam menyediakan sarana prasarana aksesibilitas untuk ABK telah sesuai dengan pendapat Ilahi (2012:167) yang mengatakan, dukungan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif. Jika sarana dan prasarana pembelajaran tidak tersedia secara memadai, guru tentu akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Terutama sarana dan prasarana khusus untuk membantu ABK.

Namun secara teknis kepala sekolah tidak begitu memahami bagaimana metode, prosedur maupun media untuk membimbing ABK, untuk itu kepala sekolah selalu berkoordinasi dan menyerahkan sepenuhnya pada koordinator inklusif. Hasil temuan dalam penelitian ini tentang kurangnya pemahaman kepala sekolah akan metode, dan media pembelajaran yang digunakan untuk membimbing ABK. tidak sesuai dengan pendapat Yuki (dalam Winardi 2010:84) yang mengatakan bahwa, keterampilan teknik kepala sekolah merupakan ilmu pengetahuan tentang metode-metode, prosedur-prosedur, proses dan teknik memimpin aktivitas, dan kemampuan penggunaan sarana-prasarana yang relevan untuk aktivitas yang ada.

Sementara untuk ketersediaan sarana prasarana aksesibilitas, baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan di SDN Mriyunan sudah tersedia di masing-masing sekolah. Namun dari ketiga sekolah yang peneliti jadikan lokasi penelitian Kepala SDN 1 Tlogopatut lebih unggul dalam menyediakan sarana

prasarana aksesibilitas bagi ABK yang ditunjukkan dengan adanya pengarah jalan (*guiding block*) bagi peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra, Ramp (bidang miring pengganti tangga) untuk pemakai kursi roda dan bagi tuna daksa, dan *railing* yang diletakkan didalam kamar mandi sebagai tempat pegangan.

Ketersediaan sarana pembelajaran seperti alat peraga edukatif cukup bervariasi dibandingkan dua sekolah lainnya. Dalam penelitian ini membenarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Butir 1 pasal 46), bahwa satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

### 3. Keterampilan Hubungan Manusia Kepala Sekolah dalam Mengelola GPK

Berdasarkan hasil penelitian masing-masing kepala sekolah baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyunan telah mengupayakan tersedianya GPK di sekolah mereka. Meskipun masing-masing kepala sekolah belum sepenuhnya menyediakan GPK yang memiliki spesialisasi khusus dengan latar belakang pendidikan luar biasa. Seperti halnya di SDN Mriyunan yang pada bulan november kemarin menambah GPK yang memiliki latar belakang psikologi dan sebelumnya sudah pernah mengajar di sekolah inklusif. Bahkan dari tiga sekolah yang peneliti jadikan lokasi penelitian hanya ada satu sekolah yang memiliki GPK dengan latar belakang pendidikan luar biasa, yaitu di SDN 1 Tlogopatut. Hal ini disebabkan sebagai sekolah negeri penambahan guru merupakan wewenang pemerintah.

Upaya setiap kepala sekolah baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyunan untuk memenuhi tersedianya GPK dengan mengangkat GPK dari guru reguler setelah mengikuti serangkaian pembinaan dan mengangkat guru honorer untuk memfasilitasi tersedianya GPK. Hasil temuan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif menurut Depdiknas (2007:3) yang menegaskan, idealnya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusif selain diperlukan guru kelas, guru mata pelajaran juga harus ada guru pendidikan khusus yang memiliki kompetensi sesuai keahlian.

Namun terkait temuan dimana kepala sekolah menetapkan guru reguler yang telah mengikuti pelatihan berkaitan dengan penanganan ABK sebagai guru pembimbing khusus, telah sesuai dengan konsep dari Depdiknas (2007:3) yang menegaskan bahwa, guru pembimbing khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa atau pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa yang ditugaskan di sekolah inklusif.

Masing-masing kepala sekolah baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyunan dalam upaya mengatasi kurangnya kompetensi, dan keterampilan guru telah melakukan pembinaan dengan mengikutkan dalam pelatihan, bimbingan dan pembinaan secara pribadi dari kepala sekolah. Bahkan SDN 7 Sidokumpul dan SDN 1 Tlogopatut selain mengikutkan dalam pelatihan kepala sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas GPK. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk supervisi setiap satu semester sekali.

Jumlah guru pembimbing khusus baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyunan menunjukkan jumlah yang cukup kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh ABK. Di SDN 1 Tlogopatut jumlah GPK ada 9 orang, sedangkan ABK yang harus ditangani sebanyak 37 anak. Di SDN 7 Sidokumpul jumlah GPK ada 7 orang, sedangkan ABK yang harus ditangani sebanyak 30 anak. Sementara itu di SDN Mriyunan jumlah GPK ada 7 orang, sedangkan ABK yang harus ditangani sebanyak 29 anak.

Tidak sesuai jumlah GPK dengan besarnya jumlah ABK dalam penelitian ini belum sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif, karena menurut Depdiknas (2007:9), idealnya jumlah guru pembimbing khusus harus sesuai dengan banyaknya ABK.

Kepala SDN 7 Sidokumpul selama menjalankan sekolah inklusif pernah mengalami kendala dalam mengelola tenaga pendidik, yaitu sebagian guru menolak dan enggan untuk mendidik ABK karena merasa tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Guru juga menganggap ABK itu mengganggu, dan tidak selayaknya disekolahkan di sekolah reguler. Dalam proses mengatasi permasalahan yang terjadi Kepala SDN 7 Sidokumpul berupaya untuk memahami isi hati dan sikap tenaga pendidik disana berkaitan dengan gejala batinnya yang awalnya menolak dan enggan untuk membimbing peserta didik berkebutuhan khusus yang dianggapnya bukan ranahnya. Namun sedikit demi sedikit kepala sekolah mampu merubah persepsi mereka dengan menjalin komunikasi yang baik berupa pemberian bimbingan, motivasi dan arahan pada tenaga pendidik.

Upaya yang dilakukan Kepala SDN 7 Sidokumpul lebih mengarah pada hubungan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahjosumidjo (2003:101) yang menjelaskan bahwa, keterampilan manusiawi kepala sekolah diantaranya adalah kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, mengapa mereka berkata dan berperilaku, dan kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif.

Kepala SDN 1 Tlogopatut dalam mengelola tenaga pendidik lebih mengarah pada kemampuan interpersonal (*human relations*). Hubungan manusia tersebut dalam

bentuk keterbukaan, yang ditunjukkan dengan terbuka masalah keuangan, tidak menciptakan jarak, saling menghargai pendapat, menghargai hasil kinerja, menciptakan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan guru. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan memberikan wewenang dan kepercayaan penuh kepada koordinator inklusif dan GPK dalam memilih peserta didik berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah tersebut. Hasil temuan dalam penelitian ini sesuai pendapat Kartz (dalam Danim 2008:215), yang menyatakan bahwa keterampilan hubungan manusia (*human skills*) adalah kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain baik perorangan maupun dalam kelompok.

Kepala SDN Mriyunan dalam mengelola tenaga pendidik juga lebih mengarah pada hubungan manusia, yang diaplikasikan dalam bentuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan koordinator inklusif. Bentuk komunikasi yang terjalin ditunjukkan dengan saling bertukar pendapat seputar kebutuhan ABK.

Sedangkan bentuk kerjasama antara Kepala SDN Mriyunan dengan koordinator inklusif diantaranya adalah dalam program penerimaan peserta didik baru, konsultasi terkait pengadaan sarpras dan penyusunan PPI. Hal ini dibenarkan karena koordinator inklusif memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola seluruh aktivitas sekolah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebagaimana yang diungkapkan Yusuf (2014:49), koordinator program inklusif bertanggung jawab dalam mengadministrasikan seluruh aktivitas yang terkait dengan pendidikan inklusif di sekolah yang bersangkutan.

Dari beberapa pernyataan yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing kepala sekolah baik Kepala SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyunan lebih menekankan pada kemampuan interpersonal (*human relations*) dalam mengelola tenaga pendidik. Keterampilan hubungan manusia ditunjukkan kepala sekolah dalam tiga kemampuan yakni kemampuan dalam memahami isi hati, kemampuan dalam berkomunikasi dan kemampuan dalam menciptakan kerjasama yang baik.

Kemampuan memahami isi hati, ditunjukkan kepala sekolah dengan menyadari keinginan dan harapan dari tenaga pendidik yang dilihat dari sikap, perilaku dan ucapan yang dilontarkan tenaga pendidik berkaitan dengan tugas yang dijalankannya. Kemampuan dalam berkomunikasi ditunjukkan kepala sekolah dengan menciptakan komunikasi secara terbuka yakni secara dua arah. Dari komunikasi yang terjalin kepala sekolah mampu memberikan bimbingan, motivasi dan arahan pada tenaga pendidik berkaitan dengan permasalahan yang dialami.

Sedangkan kerjasama yang baik ditunjukkan kepala sekolah dengan adanya kolaborasi antara kepala sekolah dengan koordinator inklusif dalam mengelola sekolah inklusif diantaranya yaitu dalam hal program penerimaan peserta didik baru, konsultasi terkait pengadaan sarpras dan penyusunan PPI. Untuk menunjang kerjasama yang baik kepala sekolah menerapkan keterbukaan dalam setiap aktivitas yang dilakukannya diantaranya yakni terbuka akan setiap keadaan yang dialami sekolah baik dalam hal keuangan, pekerjaan maupun terbuka dalam setiap pendapat dan masukan dari setiap tenaga pendidik.

Hasil temuan dalam penelitian ini tentang keterampilan hubungan manusia yang ditunjukkan kepala sekolah dalam tiga kemampuan yakni kemampuan dalam memahami isi hati, kemampuan dalam berkomunikasi dan kemampuan dalam menciptakan kerjasama yang baik sesuai pendapat Yuki (dalam Winardi 2010:84), yang menyatakan bahwa keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan mengetahui dan melaksanakan perilaku manusia dan proses interpersonal; mampu memahami perasaan orang lain, sikap-sikap, dan motif-motif yang baik yang tersurat maupun yang tersirat dari orang lain yang berupa empati dan kepekaan sosial; mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, dan mampu mengembangkan hubungan kerjasama yang efektif.

#### 4. Keterampilan Hubungan Manusia Kepala Sekolah dalam Mengelola ABK

Berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap jumlah ABK yang bersekolah, menunjukkan bahwa prosentase jumlah siswa dinilai cukup besar yaitu 29,87% di SDN Mriyunan, 51,8% di SDN 1 Tlogopatut, dan 29,4% di SDN 7 Sidokumpul. Jika dibandingkan dengan jumlah populasi seluruh siswa yang ada. Hasil temuan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebab konsep lain yang patut dipahami dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif menurut Sapon-Shepin, (2007:9) adalah jumlah siswa penyandang cacat harus terwakili di sekolah dalam proporsi alami, artinya jumlah anak-anak cacat merupakan sepuluh persen dari keseluruhan populasi siswa yang ada. Ini berarti jumlah ideal ABK yang bersekolah dinilai melebihi jika dibandingkan dengan populasi siswa yang ada.

Adapun hasil temuan penelitian terhadap jenis kelainan ABK menunjukkan bahwa jenis kelainan ABK yang ada diketahui cukup beragam. Di SDN 1 Tlogopatut terdapat 9 jenis kelainan yaitu: autisme, ADHD, Tuna grahita, ABB, CP, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, DS, dan CP. Di SDN 7 Sidokumpul terdapat 7 jenis kelainan yaitu: lambat belajar, autisme, *Down sindrom*, hiperaktif, kesulitan bicara, tuna rungu, CP, dan tuna

ganda. Sementara itu di SDN Mriyunan terdapat 9 jenis kelainan yaitu: *slow learner*, autisme, tuna daksa, tuna grahita, tuna rungu, ADHD, ABB, dan *low vision*.

Jumlah prosentase terbesar adalah siswa autisme sebanyak 11 anak di SDN 1 Tlogopatut, siswa lamban belajar (*slow learner*) sebanyak 7 anak, di SDN 7 Sidokumpul dan siswa lamban belajar (*slow learner*) sebanyak 13 anak di SDN Mriyunan. Hasil temuan ini sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif menurut pendapat Efendi (2006:3), yang menyebutkan bahwa jenis kelainan ABK umumnya sangat beragam yang terdiri dari berbagai katagori seperti anak tunanetra, tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, cerdas istimewa dan bakat istimewa, serta anak lamban belajar dan berkesulitan belajar.

Setiap kepala sekolah baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan di SDN Mriyunan menerapkan kebijakan yang sama dalam penjangkaran peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu sama-sama hanya menerima ABK yang memiliki ketunaan ringan. Kebijakan ini tidak sesuai dengan konsep pendidikan inklusif berdasarkan Permendiknas No.70 tahun 2009 (2009:10), yang menyatakan bahwa, dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Namun kebijakan ini diambil tanpa menyalahi makna dari pendidikan inklusif itu sendiri yang mana dalam prinsipnya adalah menerima semua peserta didik. Hal itu dikarenakan SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyunan memiliki kondisi dan keadaan yang sama yaitu tidak memiliki tenaga pendidik yang berkompeten atau tidak memiliki tenaga pendidik spesialis pendidikan luar biasa dan sarana prasarana yang minim. Sedangkan di SDN 1 Tlogopatut meskipun memiliki 2 GPK yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa tapi belum mampu menangani seluruh jenis kelainan ABK.

Selain itu kepala sekolah baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan di SDN Mriyunan menerapkan kebijakan hanya 4 sampai 5 ABK yang akan diterima, dikarenakan GPK yang minim dan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kemendikbud tentang Penerimaan Siswa Baru dalam salah satu pointnya menegaskan bahwa setiap Sekolah Dasar wajib menerima peserta didik tanpa tes masuk dan tetap memprioritaskan pada anak-anak yang berusia 7–12 tahun dari lingkungan sekitarnya tanpa

diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.

Ada beberapa tahapan dalam proses penerimaan ABK yaitu, pendaftaran, proses identifikasi dan asesmen, tahap penjangkaran yang dilakukan dengan mengadakan rapat khusus, tahap pelaporan pada kepala sekolah, dan terakhir tahap pengumuman. Setiap tahapan ini baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan di SDN Mriyunan memiliki kesamaan. Proses identifikasi dan asesmen yang dilakukan disemua sekolah yang peneliti jadikan lokasi penelitian difungsikan untuk mengetahui gambaran berbagai potensi maupun hambatan yang dialami anak. Proses identifikasi dan asesmen juga digunakan sebagai dasar pembuatan Perencanaan Pembelajaran Individual (PPI).

Baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan di SDN Mriyunan sudah memiliki PPI sesuai dengan jenis kebutuhan ABK. PPI yang dimiliki setiap sekolah dibuat berdasarkan potensi dan hambatan yang dialami ABK. Hal ini sesuai dengan Permendiknas (2009:19), yakni prinsip kebutuhan individual yaitu pendidikan inklusif memperhatikan kebutuhan dan kondisi anak karena setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Setiap sekolah memiliki program pengembangan diri yang fungsinya bukan hanya untuk mengembangkan bakat dan keterampilan peserta didik tapi juga untuk menanamkan rasa kebersamaan dan menghargai perbedaan. Karena dalam setiap program pengembangan diri baik peserta didik reguler dan maupun ABK digabungkan menjadi satu. Program pengembangan diri di SDN Mriyunan diantaranya yaitu upacara bendera, tartilal-quran, senam bersama, jumat bersih dan pramuka. Di SDN 1 Tlogopatut ada angklung, menggambar, pianika, menari, pramuka, keterampilan, outbond, dan program pengembangan diri terbaru yaitu memasak yang akan digunakan untuk semester depan. Sedangkan di SDN 7 Sidokumpul program pengembangan diri ada *outching*, *outbond*, berkebun itu untuk program belajar di luar, ekstrakurikuler ada menggambar, jujitsu, dan rebana.

Hasil temuan dalam penelitian ini yang menyatukan anak ABK dengan anak reguler dalam setiap kegiatan sekolah sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam Permendiknas (2009:19), yakni prinsip kebermaknaan yang berbunyi pendidikan inklusif mengupayakan kebersamaan dalam setiap kegiatannya karenanya pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan.

Berdasarkan hasil observasi baik di SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan di SDN Mriyunan siswa reguler menunjukkan sikap yang positif terhadap ABK. Ditunjukkan dengan tidak adanya anak yang

mengina, mengucilkan, bahkan baik anak reguler dan ABK sering bermain bersama dan saling berbincang. Ini berarti bahwa siswa reguler menerima keberadaan ABK. Hasil temuan ini dinilai sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli seperti Fishbein & Ajzen, Oskamp, Petty & Cacioppo (dalam Haryono, 2014:10), yang menyebutkan bahwa sikap tidak lain adalah penilaian positif atau negatif terhadap suatu obyek. Dengan demikian sikap positif yang ditunjukkan oleh siswa normal terhadap ABK merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan program inklusif.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing kepala sekolah baik Kepala SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyuran sehubungan dengan keterampilan hubungan manusia kepala sekolah dalam mengelola ABK ditunjukkan dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan koordinator inklusi dan GPK dalam memonitor perkembangan belajar ABK.

Kepala sekolah selalu berupaya menanyakan bagaimana kondisi dan perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Kepala sekolah juga berkomunikasi dengan GPK berkaitan dengan kebutuhan apa saja diperlukan dalam proses peningkatan belajar-mengajar peserta didik berkebutuhan khusus.

Upaya yang dilakukan kepala sekolah lebih mengarah pada hubungan manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Wahjosumidjo (2003:101) yang menjelaskan bahwa, keterampilan manusiawi kepala sekolah diantaranya adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif dan kemampuan menciptakan kerjasama yang efektif dan kooperatif.

##### 5. Keterampilan Hubungan Manusia Kepala Sekolah dalam Menjalin Dukungan Orang Tua Peserta Didik

Hasil penelitian ditemukan bahwa tidak adanya keluhan dari orang tua berkaitan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 1 Tlogopatut. Orang tua juga menerima adanya kebijakan dari pihak sekolah yang mensyaratkan bagi orang tua ABK untuk dibebani adanya biaya khusus. Biaya khusus yang dibebankan pada orang tua ABK dipergunakan untuk membiayai GPK, menyediakan sarana prasarana seperti alat dan media pembelajaran khusus ABK dan kebutuhan-kebutuhan khusus ABK lainnya.

Pengalokasian dana yang dilakukan pihak sekolah sejalan dengan pendapat Yusuf (dalam Ilahi, 2013:184), yang menyatakan orang tua dituntut dapat berpartisipasi aktif dalam pengadaan alat, media dan sumber daya yang dibutuhkan sekolah.

SDN 1 Tlogopatut memiliki paguyuban ABK, paguyuban reguler dan paguyuban sekolah yang aktif.

Setiap paguyuban memiliki sistem kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Kepala SDN 1 Tlogopatut mengoptimalkan adanya paguyuban untuk mengakomodir ide-ide orang tua. Ide-ide dan usulan dari orang tua nanti akan disampaikan ke pengurus terlebih dahulu baru pihak pengurus yang akan menyampaikan pada kepala sekolah. Namun apabila informasi yang ada dianggap penting, kepala sekolah akan mengundang semua orang tua untuk mengadakan rapat bersama.

Sementara itu di SDN 7 Sidokumpul ditemukan adanya ketidakpercayaan orang tua dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Karena pernah ada keluhan dari orang tua reguler kalau anaknya sering diganggu ABK. Orang tua merasa tidak nyaman apabila anaknya dicampurkan dengan ABK pada saat proses pembelajaran. Selain itu orang tua juga pernah tidak menerima kebijakan sekolah dengan adanya biaya khusus yang dibebankan untuk orang tua ABK. Karena orang tua menganggap adanya BOSDA untuk ABK sudah cukup untuk menangani ABK.

Kondisi yang terjadi di SDN 7 Sidokumpul kurang sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif dimana salah satu komponen keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sikap positif yang ditunjukkan orang tua. Seperti pendapat Chapman (dalam Haryono, 2014:12) yang menyebutkan bahwa, sikap positif adalah perwujudan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Sikap positif orang tua siswa merupakan salah satu tolok ukur yang dapat menunjukkan dukungan seluruh orang tua siswa terhadap penyelenggaraan program pendidikan inklusif yang diselenggarakan.

Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam menyikapi kedua permasalahan ini dengan mengadakan rapat paguyuban. Namun rapat paguyuban yang diadakan jenisnya berbeda. Bedanya untuk mengatasi masalah tentang orang tua reguler yang mengeluh anaknya sering diganggu ABK adalah dengan mengadakan rapat paguyuban reguler. Karena permasalahan terjadi dalam lingkup orang tua reguler. Sedangkan untuk masalah orang tua ABK yang tidak menerima kebijakan sekolah akan adanya biaya khusus diselesaikan dengan mengadakan rapat paguyuban ABK. Karena lingkup permasalahan berkaitan dengan orang tua ABK.

Setiap rapat yang diadakan kepala sekolah lebih mengarah pada *human relation* dengan menekankan adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dilakukan dengan memberikan pemahaman pada orang tua akan setiap permasalahan dan kondisi sekolah. Selain itu kepala sekolah juga menawarkan solusi dan memberikan kesempatan pada orang tua untuk berpendapat.

Paguyuban yang ada di SDN 7 Sidokumpul selain sebagai wadah berkumpulnya orang tua, membentuk paguyuban merupakan upaya sekolah untuk mengikutsertakan orang tua dalam merencanakan dan mengawasi program sekolah. Agar sekolah dan orang tua dapat terjalin hubungan yang harmonis.

Sementara itu hasil penelitian di SDN Mriyuran menunjukkan kalau tidak ada biaya khusus yang dibebankan pada orang tua ABK. Kepala sekolah menerapkan kebijakan ini dikarenakan melihat kondisi sekolah yang berada di pedesaan dengan tingkat pemahaman masyarakat yang kurang dengan pendidikan. Orang tua masih malu dengan keadaan anaknya dan menganggap ABK tidak perlu untuk disekolahkan.

Namun orang tua di SDN Mriyuran baik reguler maupun ABK tidak pernah komplain dengan program-program sekolah. Bahkan orang tua membantu program sekolah dengan memfasilitasi anaknya seperti alat pendengar untuk anak mereka yang tuna rungu dan mengikutkan anak mereka terapi. Pihak sekolah memberikan kelonggaran pada orang tua apabila mau menerapkan anaknya meskipun pada waktu jam pelajaran. Keadaan ini membenarkan teori Wahjosumidjo (2007:334) yang berpendapat, tujuan pokok menjalin hubungan efektif dengan masyarakat setempat adalah untuk memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti dalam kegiatan pendidikan sekolah.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kepala SDN Mriyuran mampu membina dan menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa (2005:187) yang menjelaskan bahwa, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk: (1) saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja; (2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan perannya masing-masing; (3) kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.

Dari beberapa pernyataan yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing kepala sekolah baik Kepala SDN 1 Tlogopatut, SDN 7 Sidokumpul dan SDN Mriyuran dalam menjalin dukungan orang tua lebih mengarah pada keterampilan hubungan manusia. Kepala sekolah menekankan adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dilakukan melalui media rapat khusus, rapat kelas maupun dibentuknya paguyuban-paguyuban. Melalui media-media tersebut kepala sekolah

memberikan sosialisasi, memberikan kesempatan pada orang tua peserta didik untuk berpendapat, dan memberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide. Dalam setiap komunikasi yang terjalin kepala sekolah menerapkan sistem demokratis dimana kepala sekolah menghargai pendapat dan ide-ide yang diberikan orang tua peserta didik.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis data sebagaimana sub fokus penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan inklusif adalah sekolah dengan prinsip kebersamaan karena menampung peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya dalam satu lingkungan yang sama, dimana untuk menyelenggarakannya membutuhkan penanganan khusus yang sedikit berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Karena sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terdapat sejumlah anak berkebutuhan khusus yang memerlukan penanganan yang sedikit berbeda dengan anak reguler pada umumnya baik dari segi tenaga pendidik, sarana prasarana, sistem penerimaan, penempatan, maupun pembinaanya.
2. Keterampilan teknik kepala sekolah dalam menyediakan sarana prasana aksesibilitas ABK adalah kemampuan kepala sekolah dalam menyediakan berbagai sarana prasarana khusus terutama media pembelajaran khusus yang disesuaikan dengan jenis kebutuhan ABK. Meliputi kemampuan dalam memahami berbagai metode, prosedur maupun media untuk membimbing ABK.
3. Keterampilan hubungan manusia kepala sekolah dalam mengelola GPK adalah kemampuan interpersonal (*human relations*) yang terdiri dari kemampuan dalam memahami isi hati, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan dalam menciptakan kerjasama yang baik. Kemampuan memahami isi hati, ditunjukkan dengan menyadari keinginan dan harapan dari tenaga pendidik, kemampuan berkomunikasi ditunjukkan dengan menciptakan komunikasi secara terbuka yakni secara dua arah, sedangkan kerjasama yang baik ditunjukkan kepala sekolah dengan adanya kolaborasi antara kepala sekolah dengan koordinator inklusi dalam mengelola sekolah inklusif.
4. Keterampilan hubungan manusia kepala sekolah dalam mengelola ABK adalah kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama yang baik dengan koordinator inklusi dan GPK dalam memonitor perkembangan belajar ABK, dengan selalu berupaya menanyakan kondisi dan perkembangan peserta didik

berkebutuhan khusus dan berkomunikasi seputar kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam proses peningkatan belajar-mengajar peserta didik berkebutuhan khusus.

5. Keterampilan hubungan manusia kepala sekolah dalam menjalin dukungan orang tua peserta didik adalah kemampuan berkomunikasi yang baik yaitu komunikasi yang demokratis di mana kepala sekolah menghargai pendapat dan ide-ide yang diberikan setiap orang tua peserta didik.

### Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan, khususnya bagi kepala sekolah yang dijadikan subjek penelitian.

1. Untuk meningkatkan keterampilan manajerialnya dalam mengelola sekolah inklusif, maka disarankan agar kepala sekolah masih perlu meningkatkan kinerjanya dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya. Upaya untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah tersebut dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan semua pihak, tidak merasa puas dengan kemampuan yang telah ada dan sering melakukan evaluasi diri, untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru dalam membimbing ABK, maka disarankan baik GPK dan guru reguler perlu lebih sering diberikan kesempatan dan dilibatkan dalam berbagai forum pendidikan inklusif agar pemahaman dan kompetensinya dalam menangani ABK semakin meningkat.
3. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran bagi ABK dapat dilakukan dengan menambah sarana dan prasarana khusus yang sesuai karakteristik ABK.
4. Untuk mempererat dukungan dan kerjasama orang tua, diharapkan pihak sekolah lebih intensif menjalin hubungan baik dengan orang tua, dengan lebih sering mengadakan pertemuan, dan lebih transparan dalam setiap program dan kegiatan sekolah.

### DAFTAR PUSTAKA

Antarjatim, online: <http://www.antarajatim.com>. Diakses tanggal 12 November 2015.

Astuti, Idayu. 2011. *Pakem Sekolah Inklusif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Danim, Sudarwan. 2008. *Pengantar Kependidikan*. Jakarta: CV. Pustaka Setia.

Danim, Sudarwan dan Suparno. 2009. *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Depdiknas. 2007. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktur Pembinaan SLB

Efendi, Mohammad. 2009. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Haryono, Gusti Nono. 2014. Studi Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Kabupaten Pontianak. (Online), <http://jurnal.untan.ac.id>. Diakses tanggal 2 Maret 2016.

Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Jawa Pos, online: <http://www.pustakaindonesia.org>. Diakses tanggal 12 November 2015.

Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.

Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Gresik. (Online), <http://jdih-gresik.com>. Diakses tanggal 14 November 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Sapon-Shevin, Mara. 2007. *Widening the Circle the Power of Inclusive Classrooms*. Bacon Press : Boston.

Wahjosumidjo. 2010. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju